

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Negara yang berkeadilan sosial berarti negara yang mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, masyarakatnya serta adil terhadap lingkungan alamnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial maka Indonesia adalah negara yang memiliki kebenaran secara moral atau kebenaran yang dibutuhkan setiap orang akan aturan hukum yang adil yang sifatnya tidak memihak, yang tidak hanya adil terhadap korban, tetapi juga adil bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat

kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat serta dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan narkotika tersebut dengan menyusun rencana kebutuhan tahunan narkotika dengan jalan mengimpor dari negara lain, produksi dalam negeri dan dari sumber lainnya sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Namun, disisi lain narkotika juga sering disalahgunakan sampai pada tahap yang mengancam kestabilan negara Indonesia sendiri karena rusaknya generasi penerus bangsa.

Pada awal kemunculannya, narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium<sup>1</sup>. Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika juga digunakan secara ilegal. Dengan kata lain pemanfaatannya disalahgunakan. Awalnya narkotika masih digunakan

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 3

sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, disamping juga adanya faktor-faktor yang membuat seseorang akhirnya menjadi pecandu narkoba.

Ada 3 faktor penting yang menjadi penyebab seseorang kecanduan narkoba, yaitu :<sup>2</sup>

a. Alasan Psikologis

Kebanyakan orang yang menggunakan obat (narkoba) awalnya untuk coba-coba atau sekadar mencari kesenangan. Beberapa orang bisa mengendalikan sehingga tak kecanduan. Namun untuk orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kecanduan. Orang yang kecanduan obat-obatan sering berjuang dengan pengalaman emosional yang kuat dan sulit untuk menanganinya. Pengalaman emosional yang paling umum adalah kemarahan, rasa bersalah, sedih, merasa kosong dan kesepian. Mereka yang menjadi pecandu menggunakan obat-obatan untuk mematikan emosi, melarikan diri dari rasa sakit dan cara untuk meningkatkan harga diri.

b. Trauma Sosial

Hal ini terkait dengan trauma sosial dan menjadi penyebab penting dari penggunaan narkoba atau kecanduan kompulsif. Trauma sosial dapat melibatkan diri sendiri, budaya dalam keluarga atau sosial. Namun umumnya disebabkan oleh perilaku seks yang menyimpang,

---

<sup>2</sup>Inilah Penyebab Orang Kecanduan Narkoba, diakses dari [www.beritasatu.com/features/55974/inilah-penyebab-orang-kecanduan-narkoba.html](http://www.beritasatu.com/features/55974/inilah-penyebab-orang-kecanduan-narkoba.html), pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 11.30

penelantaran emosi, lingkungan keluarga terganggu, kekerasan fisik, kekerasan teroris dan pengasingan.

c. Peran gen dan penyakit mental.

Penelitian telah menemukan adanya korelasi antara genetika biokimia obat, dan penyakit mental tertentu juga memicu seseorang untuk lebih mudah jatuh dalam kecanduan narkoba.

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Karena pada tahun inilah lintas penyelundupan narkotika internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat penganut para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian timbul pertanyaan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi orang-orang terutama para remaja yang sudah kecanduan narkoba itu.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia diantaranya dengan terus memperbaharui produk hukumnya. Pengaturan tentang Narkotika telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan lahirnya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) tahun 1927. Tapi peraturan ini hanya mengatur tentang penggunaan candu dan obat bius dan melegalkan penggunaannya selama hanya dilakukan di tempat yang sudah ditetapkan. Namun, pada masa penjajahan Jepang, peraturan narkotika ini dihapuskan dan pemakaian candu dilarang secara mutlak.

Pada tahun 70-an efek penyalahgunaan narkotika telah mengarah

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 113

keranah kriminalitas, dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan, sehingga pada tanggal 8 September 1971 Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan nasional, diantaranya masalah penyalahgunaan narkotika. Tetapi pada perkembangannya, Inpres No.6 tahun 1971 ini ternyata tidak mampu mengendalikan penyalahgunaan narkotika secara tuntas, penyebabnya antara lain karena sanksi hukuman yang tidak sebanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika serta belum adanya ketentuan khusus wajib lapor terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat.

Pada tahun 1976 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Lagi-lagi perkembangan zaman bisa mendapatkan celah dari kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, sehingga pemerintah pun merevisi Undang-Undang tersebut hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, diharapkan tindak pidana narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya, karena itulah sebenarnya didalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang lain yang menyangkut narkotika.<sup>4</sup> Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukan kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua

---

<sup>4</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.6



hal, yaitu : *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>5</sup> Semakin tingginya peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan semakin tinggi pula jumlah pecandu narkoba di Indonesia, karena jumlah peredaran narkoba berbanding lurus dengan jumlah pecandu narkoba.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tidak hanya dengan mengatur ancaman pidana yang berat bagi pengedar , pemilik ataupun pihak yang memproduksi narkoba secara ilegal tetapi juga harus dibarengi dengan usaha menyelamatkan pecandu narkoba dari jerat narkoba karena mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga merupakan korban kejahatan yang dilakukannya sendiri yang disebut juga “*self victimizing victims*”,

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>6</sup>

a. *Unrelated victims*

yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

b. *Provocative victims*

yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.53-54

terjadinya kejahatan.

c. *Participating victims*

yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically weak victims*

yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims*

yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*

yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena penggunaan narkoba dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sehingga ia melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan pidana narkoba. Sehingga, jika ia memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan penyalahgunaan narkoba maka ia haruslah dijatuhi pidana. Dikatakan sebagai korban, karena akibat penggunaan narkoba tersebut penggunalah yang merasakan sakit, menderita dan kerugian bukan orang lain. Berbeda halnya apabila ia adalah seorang pengedar atau terlibat dalam transaksi jual beli narkoba. Dalam hal ini korbannya bukanlah sipelaku tetapi orang lain atau masyarakat.

Seseorang yang sudah kecanduan narkoba memerlukan proses untuk penyembuhan dan juga harus disertai dengan dukungan keluarga. Karena , apabila dilihat dari aspek kesehatan pecandu narkoba adalah orang-orang yang menderita sakit. Memenjarakannya bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Selain itu kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak mendukung bila narapidana pengguna narkoba digabung dengan tahanan kriminal lainnya, dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kesehatan.

Ditinjau berdasarkan segi filosofis, terdapat hal-hal lain yang bertentangan dalam pelaksanaan pidana penjara, yakni:<sup>7</sup>

1. Bahwa tujuan dari penjara adalah menjamin pengamanan narapidana serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk direhabilitasi;
2. Bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Selain itu, keberadaan penjara saat ini mulai tumbuh sebagai tempat pencemaran (*a place of contamination*) bagi para “penjahat kebetulan” (*accidental offenders*) atau pendatang baru dalam kejahatan (*novices in crime*) karena dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, ed. 2., cet. 2., PT. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 77.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.79.



Maka perlu diadakan kembali pembaruan terhadap Undang-Undang Narkotika sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat perbedaan mendasar dalam Undang-Undang ini dibandingkan undang-undang narkotika sebelumnya yaitu kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berikut :

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya terhadap seseorang yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, jadi bukan pengedar atau terlibat dalam transaksi jual beli narkotika. Seorang pecandu narkotika sudah dipastikan adalah pemakai atau pengguna narkotika. Sehingga Pasal yang dimaksudkan terhadapnya adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Setiap penyalahguna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menyebutkan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagai perwujudan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dibentuklah peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Rrepublik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana umum sesuai dengan hukum acara pidana dan juga berwenang melakukan eksekusi terhadap perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditingkat penuntutan berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi serta eksekusi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur lebih rinci kapan seseorang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan dapat dituntut dengan rehabilitasi. Untuk itu Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-

029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi.

Ada beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi diantaranya penanganan pada tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan / penetapan hakim. Penanganan pada tahap penuntutan mengatur tentang hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut penyalahguna narkoba dengan tuntutan Rehabilitasi. Sebagai eksekutor, disini penulis hanya akan membahas peran Jaksa Penuntut Umum sampai pada tahap penyerahan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk.

Namun, adanya peraturan terkait kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga memberi celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan aturan ini. Dipaksakannya pelaku penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi atau setidaknya terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan mengindahkan aturan hukum yang ada.

Sumatera Barat saat ini sudah darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Sumbar sudah masuk ke semua kalangan dan cakupannya luas. Penyalahgunaan narkoba sudah mencakup kalangan remaja, dewasa dan menjangkau ke perkantoran serta lingkungan Pendidikan. Data dari BNN

Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat saat ini berada pada peringkat 21 dari seluruh Provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penyalahgunaan narkoba. Dari seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat kota Padang tercatat kasus paling tertinggi, untuk penangkapan kasus narkoba, baik itu jenis ganja, sabu dan eskasi.<sup>9</sup>

Sebagai studi kasus dalam tesis ini adalah tuntutan Rehabilitasi Jaksa Penuntut Umum terhadap pecandu narkoba yaitu Perkara Nomor PDM-648/Euh.2/Pdang/09/2016 atas nama terdakwa Suhendri Pgl Hen. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Suhendri Pgl Hen dengan tuntutan pidana penjara dan Rehabilitasi dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu melanggar Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara diatas menarik untuk diteliti jika melihat Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Suhendri Pgl Hen. Berdasarkan uraian diatas, serta memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba maka penulis tertarik membahas tentang **DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang)**

---

<sup>9</sup> *Sumbar Darurat Narkoba*, diakses dari <http://carano.info/sumbar-darurat-narkoba/>, pada tanggal 17 April 2017 pukul 21.35



## B. Rumusan Masalah

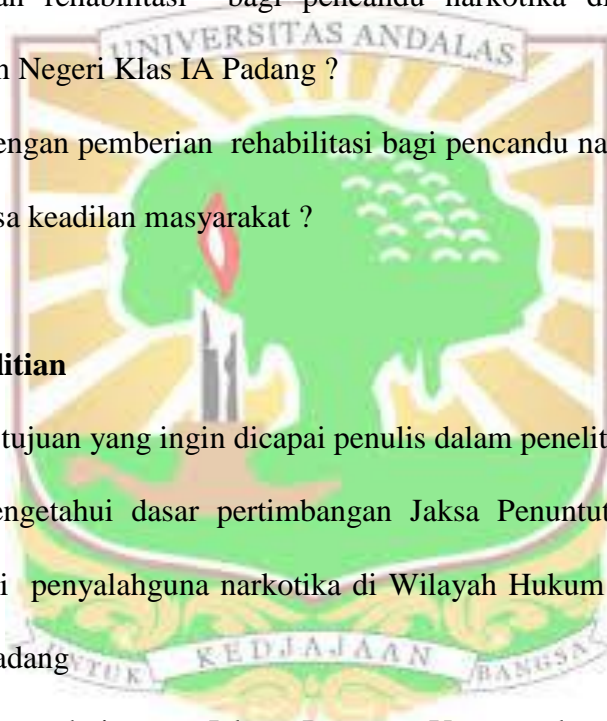
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
2. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pencandu narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
3. Apakah dengan pemberian rehabilitasi bagi pencandu narkoba telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang
2. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pencandu narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
3. Untuk mengetahui apakah dengan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- 2) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah pertimbangan jaksa penuntut umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkoba sebagai upaya mewujudkan asas keadilan.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkoba di wilayah hukum masing-masing.
- 2) Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri khas

teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

#### **a. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan berasal dari kata “Pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi, pemidanaan dapat diartikan pula dengan penghukuman.<sup>11</sup> Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti dari kesalahannya tersebut.<sup>12</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini tetapi secara garis besar teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:<sup>13</sup>

##### **1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Teori ini berpendirian bahwa pidana perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Penjatuan pidana yang pada dasarnya

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.13

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.125

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 157.

merupakan penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini menggabungkan pendapat teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dikenakan tidak saja untuk membalas perbuatannya yang merugikan masyarakat akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini terdapat tiga aliran yaitu yang menitikberatkan pada pembalasannya itu sendiri, yang menitikberatkan pada mempertahankan ketertiban masyarakat dan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Selain itu juga ada teori *treatment* (teori pembinaan/perawatan), *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.<sup>14</sup> Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang

---

<sup>14</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban sipembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi, aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran positif melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan kepada pelaku ini adalah untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki<sup>15</sup>

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*. Namun demikian, sebagai manusia seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.<sup>16</sup>

## **b. Teori Peran**

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.61

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 28



dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.<sup>17</sup> Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran dengan orang-orang disekitarnya yang ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

#### c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mengenai keadilan telah dirumuskan oleh beberapa ahli. Pada abad pertengahan (*masa scholastic*), muncul seorang Thomas Aquinas yang merupakan pelanjut dari pemikiran aliran hukum alam. Thomas Aquinas membedakan keadilan atas 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif

---

<sup>17</sup> *Teori Peran Dalam Psikologi*, diakses dari <https://dosenpsikologi.com/teori-peran-dalam-psikologi>, pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 13.25

(*justitia vindicativa*). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Disini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>18</sup>

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunnalagatama*) baik yang sukarela maupun tidak.<sup>19</sup>

Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu

---

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 295

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedis Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.157

yang semestinya. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang tidak dengan sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan.<sup>20</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

### **a. Dasar Pertimbangan**

Pertimbangan adalah bahan pemikiran/pendapat tentang baik dan buruk.<sup>21</sup> Pertimbangan dilakukan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya pertimbangan, diharapkan tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Dalam wilayah hukum, pertimbangan dalam melakukan sesuatu didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

### **b. Jaksa Penuntut Umum**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan

---

<sup>20</sup> Muhammad Erwin, *Op.cit*, hlm. 294

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/pertimbangan> pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 17.45

lain berdasarkan undang-undang.<sup>22</sup> Dan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup> Jadi, selain bertindak sebagai Penuntut Umum, Jaksa juga berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*).

Sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim<sup>24</sup> Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan dipitus oleh Hakim disidang Pengadilan.<sup>25</sup> Pada tahap penuntutan ini, Penuntut Umum melaksanakan kewenangannya untuk menuntut seseorang yang berdasarkan pemeriksaan selama persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakannya. Tuntutan tersebut tidak hanya terbatas telah terbuktinya seseorang melakukan tindak pidana tetapi juga terkait jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana baik dalam bentuk pidana ataupun tindakan.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, Jaksa berasal dari kata Seloka Satya Adhi Wicaksana yang

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan, Pasal 2

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ke- 6 huruf a

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 1 Ke- 6 huruf b

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 1 Ke-7

merupakan Trapsila Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut :

- Satya yang berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa Jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.
- Adhi berarti kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- Wicaksana berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.<sup>26</sup>

### c. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.<sup>27</sup>

Dalam perkara narkoba, rehabilitasi dilakukan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ada 2 (dua) rehabilitasi yaitu :

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.

---

<sup>26</sup> Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI NO. Kep 074/J.A/7/1978 tanggal 17 Juli 1978.

<sup>27</sup> David Arnot, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: perawatan Alternatif dan tradisional*, volume 7, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 85



- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### **d. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup>

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>29</sup>

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahkan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>30</sup> Sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus - menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 14

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : tanaman ganja, candu, kokain mentah, MDMA
- b) *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfin.
- c) *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

**e. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup 3 (tiga) hal:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- b) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat

#### **f. Asas Keadilan**

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>32</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris (yuridis sosiologis atau *social legal approach*) yakni metode penelitian yang

---

<sup>32</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 85

dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan langsung data yang dibutuhkan di lapangan yakni di Kejaksaan Negeri Padang

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan di atas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang serta pemberian rehabilitasi bagi pencandu narkoba dan rasa keadilan masyarakat.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan para Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang serta pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder dapat dibagi menjadi :<sup>34</sup>

1) Bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor : Per-029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
- g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *op.cit*, hlm.106



Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur<sup>35</sup>. Wawancara dilakukan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang dan masyarakat.
- c. Populasi Dan Teknik Sampling
  - 1) Populasi

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 262-263.

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah perkara tindak pidana Narkotika yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut Rehabilitasi.

## 2) Teknik Sampling

Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi obyek penelitian.<sup>37</sup> Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subjeknya didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu berdasarkan objek yang diteliti. Sehubungan dengan itu maka respondennya adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang dan masyarakat.

## 5. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 44.

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *op.cit*, hlm.98

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.



